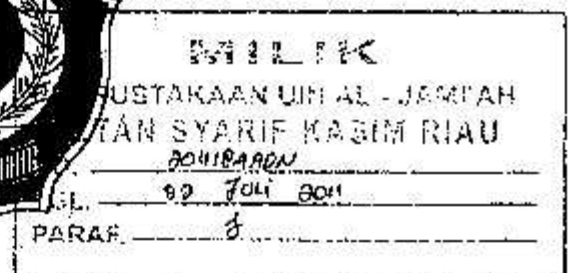


SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DESA OLEH PEMERINTAH KECAMATAN DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Disusun Oleh

SYAFRIZAL
NIM. 10675005130

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKAN BARU
RIAU
2011

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SYAFRIZAL
NIM : 10675005130
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN
DESA OLEH PEMERINTAH KECAMATAN DI
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN
BENGKALIS
HARI / TGL : SENIN / 11 APRIL 2011

PANITIA PENGUJI

KETUA

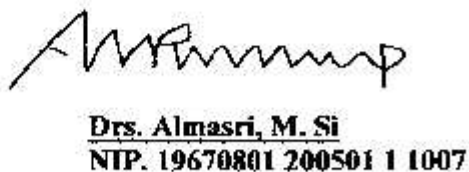

Drs. ZAHARIL YAHYA, MM
NIP. 19520615 198103 1 003

SEKRETARIS

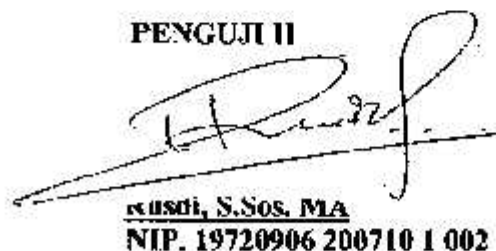

TAREQOH KEMAL, S.Sos
NIK. 13001005

ANGGOTA

PENGUJI I


Drs. Almasri, M. Si
NIP. 19670801 200501 1 1007

PENGUJI II


Rusdi, S.Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa penulis pesembahkan kepada Rasul SAW yang telah berhasil membawa kehidupan manusia menuju nilai-nilai tuntunan islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan rujukan umat islam dalam setiap gerak dan langkah manusia menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran – saran dan kritikan – kritikan yang membangun bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan terutama kepada

1. Ayahanda Sudirman dan Ibunda Jariah yang tercinta yang telah banyak memberikan kasih sayang yang berlimpah, kesabaran doa dukungan serta nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakanda Desirizal. Amd, Jefrizal, Fikha Andriani, Novilla Santi, dan Adik saya, M. Zainal serta seluruh keluarga besar penulis, terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan, dukungan, saran dan nasehat – nasehatnya selama ini.
3. Bapak Rusdi, MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberi masukan – masukan, saran selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mashuri, MA sebagai pembimbing II yang telah banyak mengarahkan dan memberikan saran selam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Almasri, M.Si. selaku ketua jurusan Administrasi Negara dan Penasehat Akademis selama masih dalam masa perkuliahan.
6. Bapak Rusdi, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara dan
7. Dan tak lupa pula kepada rekan – rekan seperjuangan dan sepenanggungan Anik, Linda, Ika, Asih, Mbak Dwi, Eni, Ati, Ratna, Nurma, Ria, Yusman, Farol, Ucok, Rustam, Heri, Andrigo, Pendi, Anton, Syaril, Zulkardi, Rinto, Ijal, Supar dan semuanya khusus nya rekan – rekan Administrasi Negara 2006, yang telah banyak membantu baik motivasi maupun ide dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada bapak dan ibu serta seluruh rekan – rekan sekalian.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini diridhoi Allah SWT dan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, Amien.

Pekanbaru, Januari 2011

Penulis

Syafrizat

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Definisi Pemerintah dan Pembinaan	12
1. Pemerintah.....	12
2. Pembinaan	19
B. Konsep Operasional	23
C. Operasional Variabel Penelitian.....	25
D. Teknik Pengukuran	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi Dan Sampel	31
D. Teknik Penarikan Sampel.....	32
E. Jenis dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisa Data.....	34
H. Jadwal Waktu Penelitian	34

BAB IV Gambaran Umum Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

A. Keadaan Geografis Wilayah.....	36
B. Penduduk dan Mata Pencaharian	38
C. Pendidikan dan Agama.....	40
D. Struktur Organisasi.....	42
E. Gambaran Desa Sampel	47
F. Keadaan Desa Di Kecamatan Bengkalis.....	49

BAB V Hasil Dan Pembahasan Penelitian

A. Identitas Responden	56
1. Jenis Kelamin	56
2. Usia.....	57
3. Pendidikan.....	57
4. Masa Kerja	58
B. Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Desa Oleh – Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Bengkalis.....	59
1. Pemberian Pedoman	61
2. Standar Waktu dan Biaya Pelaksanaan Tugas	64
3. Perencanaan.....	67
4. Bimbingan	71
5. Supervisi	73

BAB VI Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DESA OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK

Oleh :
Syafrizal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Program Pembinaan Desa Oleh Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kecamatan (Camat, Sekcam, Kaur Pemerintahan), pemerintah Desa, ketua LPM dan BPD, serta kepala dusun yang berjumlah 45 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari responden penelitian mengenai pelaksanaan program pembinaan desa oleh pemerintah kecamatan Bengkalis, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain berupa struktur organisasi, jumlah sarana dan prasarana kecamatan Bengkalis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dimana peneliti mengamati gejala – gejala yang terjadi di kecamatan Bengkalis yang berhubungan pelaksanaan program pembinaan desa, disamping itu peneliti melakukan wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) mengenai indikator penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisa dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk uraian sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa program pembinaan desa oleh pemerintah kecamatan di kecamatan Bengkalis dapat dikategorikan cukup baik, artinya masih ada sebagian indikator yang terlaksana dengan baik karena kerjasama dari semua pihak pegawai pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa juga masyarakat. Adapun sebagian indikator yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan tingkat pendidikan pegawai pemerintah desa dan kepala dusun relatif masih rendah sehingga kurang mampu memahami petunjuk dan arahan dari pemerintah kecamatan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat dengan intensif (minimal 3 bulan sekali)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah salah satu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian manusia memerlukan Negara untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tujuan warga Negara Indonesia sekaligus tujuan Negara Indonesia dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social dengan kata lain tujuan ingin dicapai adalah masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut Negara membutuhkan alat (organ) yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yang disebut pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa menetapkan peraturan-peraturan berupa kebijakan-kebijakan pemerintah (*public policy*) yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*) (Dye dalam Syafi'ie, 2003 : 168).

Kebijakan pemerintah ditujukan untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata hubungannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam suatu Negara adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun demikian kebijakan pemerintah cenderung tidak merata hanya berpusat di Pulau Jawa saja, oleh karena itu untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan agar merata di seluruh daerah di Indonesia pemerintah memberikan Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang tersebut Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonomi adalah kegiatan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah yang terdiri atas Propinsi dan Propinsi terdiri atas Kabupaten dan Kota dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam pasal 10 ayat 5 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintahan atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa berdasarkan atas tugasnya.

Tugas-tugas tersebut juga diemban oleh Camat Bengkalis selaku pimpinan dari Kecamatan Bengkalis. Di samping tugas umum pemerintahan tersebut Camat Bengkalis juga mempunyai tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati Bengkalis yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang struktur organisasi dan tata kerja kecamatan dan daerah Kabupaten Bengkalis pasal 3 yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan yang juga tercantum dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 10 tahun 2003 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur pada Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan pengertian bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja kecamatan harus dikoordinasikan dengan camat.
- b. Pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, ketentraman, dan ketertiban serta pembinaan pamong praja.
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi bidang perekonomian, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan dalam wilayah kerja.
- d. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan atau kesejahteraan social seperti PKK Desa.
- e. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan umum meliputi administrasi, kependudukan dan kebersihan seperti pengawasan terhadap mutasi penduduk di wilayah kecamatan.
- f. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang administrasi umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan serta bertanggung jawab

penuh terhadap segala urusan yang ada dalam pemerintahan kecamatan tersebut.

- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas pemerintahan kecamatan secara teknis operasional dan teknis administrasi kepada daerah.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada daerah sesuai dengan bidang-bidangnya.

Dari uraian tugas umum pemerintahan, tugas pokok dan fungsi camat tersebut dapat dilihat bahwa camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks, untuk itu penulis hanya menitikberatkan kepada pembinaan desa. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dengan demikian pemerintah memberikan kewenangan untuk menjadi *self governing community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya dan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sesuai dengan kondisi masyarakat sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian berupa pembinaan agar desa-desa tersebut dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pembinaan dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintah pusat dapat

mendelegasikan wewenang dan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, berdasarkan penjelasan UU No. 11 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemanfaatan tata ruang, penyelenggaraan ketentraman masyarakat, penanggulangan masalah sosial, pelayanan administrasi umum pemerintahan, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian dengan adanya pendelegasian urusan pemerintahan diharapkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat termasuk layanan pendidikan, namun di Kecamatan Bengkalis ternyata sebagian besar penduduknya tidak tamat SD artinya pendudi belum dimudahkan untuk mengakses pelayanan pendidikan, padahal sebagian besar penduduk di Kecamatan Bengkalis berada pada usia produktif, 17 Desa dan 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkalis. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini :

Tabel I.1 : Nama-nama Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Bengkalis

No.	Nama-nama Desa dan Kelurahan	Ket.
1.	Bengkalis Kota	Kelurahan
2.	Rimbasekampung	-
3.	Damon	-
4.	Wonosari	Desa
5.	Senggoro	-
6.	Air Putih	-
7.	Pangkalan Batang	-
8.	Meskom	-
9.	Teluk Latak	-
10.	Sebauk	-
11.	Sungai Alam	-
12.	Penampi	-
13.	Temeran	-
14.	Penebal	-
15.	Permatang Duku	-
16.	Ketam Putih	-
17.	Kelapapati	-
18.	Pedekik	-
19.	Kelemantan	-
20.	Sekodi	-

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan daerah termasuk desa agar tujuan dari Otonomi Daerah dapat tercapai, seperti yang diungkapkan oleh Widjaja (2003 : 23), untuk melakukan otonomi desa maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam, sumber daya manusia harus dapat

dioptimalkan, dan asosiasi desa belum berubah seperti yang dikatakan oleh Pambudi (2003 : 3), desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial yang adat dan tradisi yang kuat, bersahaja serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Jika dilihat dari sarana yang diberikan oleh pemerintah dapat dilihat bahwa sarana pendidikan cukup memadai tetapi sekolah kejuruan belum ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bengkalis

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	25
2	SD	20
3	SLTP/MTS	15
4	SLTA/MAN	8
5	SMK	0
Σ	Jumlah	68

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah cukup memadai tapi sekolah kejuruan belum ada. Dan dapat dilihat bahwa pemerintah desa belum secara optimal menggunakan wewenang atau melaksanakan tugasnya dalam memberikan kontribusi untuk menghadapi, merawat sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung sekolah dan lain-lain. Hal ini juga menunjukan pembinaan yang dilakukan oleh camat terhadap desa belum optimal, selama ini program pembinaan yang dilakukan oleh camat sama

bagi semua desa. Untuk lebih jelasnya program pembinaan yang dilakukan oleh camat Bengkalis dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini :

Tabel 1.3. Program Pembinaan Desa Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2010

No	Program Pembinaan
1	Pelatihan aparat
2	Pembinaan bidang pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi
3	Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
4	Pembinaan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
5	Pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
6	Pembinaan dalam bidang administrasi meliputi ketatausahaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan
7	Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
8	Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
9	Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
10	Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa seperti membina kepemudaan, para wanita (PKK) dan olahraga

Sumber : Kantor Camat Bengkalis 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat program pembinaan yang telah dilakukan oleh Camat Bengkalis untuk semua desa yang ada di Kecamatan Bengkalis, berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis No. 10 Tahun 2004 dalam Pasal 2 tentang Tugas dan Tata Kerja Camat, namun berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dengan camat dan salah satu kepala desa pada kenyataannya pembinaan hanya berjalan beberapa bulan saja, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan yang lebih intens

dan lebih relevan bagi perkembangan desa serta disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masing – masing desa. Hal ini perlu dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program, karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi Daerah, oleh karena itu terhadap kelurahan atau desa perlu dilakukan pembinaan yang menjadi tanggung jawab camat.

Berdasarkan fenomena – fenomena di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Desa oleh Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah penelitian **“ Bagaimana Pelaksanaan Program Pembinaan Desa Oleh Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis ”**.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan desa oleh pemerintah kecamatan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
- b. Faktor – faktor penghambat pelaksanaan program pembinaan desa oleh pemerintah Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai program pembinaan desa oleh pemerintah kecamatan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kecamatan dalam mengambil keputusan dalam bidang pembinaan desa.
- c. Sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam program pembinaan desa.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Definisi Pemerintah dan Pembinaan

1. Pemerintah

Menurut Taliziduhu Ndaha (2003 : 5) Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang menjadi istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Menurut Ndaha (2003 : 428) juga menyatakan pemerintahan terlebih dahulu sebagai suatu kegiatan penyediaan dan distribusi layanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan, pelaku kegiatan itulah yang disebut dengan pemerintah. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pejabat, instansi atau lembaga.

Menurut Prajudi (dalam Syafi'ie, 2003 : 33) tugas-tugas pemerintah antara lain tata usaha Negara, rumah tangga Negara, pemerintahan,

pembangunan dan lingkungan hidup, sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan karena tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas yang dibebankan kepada pemerintah. Ndraha (2003 : 428) menyatakan pemerintah sebagai suatu kegiatan atau proses penyediaan dan distribusi pelayanan public yang tidak dapat di privatisasikan dan pelayanan sipil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan. Dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pemerintahan adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Pejabat, Instansi, atau Lembaga.

Untuk mengemban tugas Negara tersebut, menurut Ndraha (2000 : 78-79), pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat dipripatisasikan termasuk jasa Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), Layanan Sipil, dan Layanan Birokrasi. Sementara itu, fungsi sekunder yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan dengan pemberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka

semakin meningkat pula fungsi pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negative dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder secara perlahan-lahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah.

Sementara itu, Rasyid (2000 : 59) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintah adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi kelangsungannya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan

pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan-lahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Camat memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani urusan pemerintahan dan salah satu tugas yang harus dilaksanakannya berdasarkan instruksi Bupati adalah pembinaan.

Sedarmayanti (2004 : 9) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyatnya, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencederaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan Kooiman (dalam Sedarmayanti, 2004 : 40) menuliskan bahwa dalam masyarakat yang modern dan dinamis yang kompleks serta sangat beragam pemerintah memiliki tugas atau peran baru, yaitu:

- a. Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti penarikan diri dalam berbagai kesempatan, namun seringnya (dan pada saat yang sama), hal ini berarti mengambil tanggung jawab untuk

- mengkoordinasikan interaksi sosial politik yang memberikan dorongan bagi sistem interaksi sosial politik untuk mengatur dirinya.
- b. Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan bentuk "*co-arrangement*" dimana permasalahan tanggung jawab dan tindakan kolektif ditanggung bersama.

Dari tugas-tugas diatas terlihat bahwa tugas pemerintah sangat kompleks oleh karena itu kepala Negara sebagai penanggung jawab pemerintahan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat-pejabat di bawahnya seperti pemerintah Propinsi untuk menjalankan tugas pemerintahan di daerah, berdasarkan azas pembantuan, demikian juga pemerintah di Kabupaten atau Kecamatan untuk mempermudah pelaksanaan pemerintah. Adapun tugas umum pemerintahan kepada Kecamatan menurut Pasal 126 ayat 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Groos et.al (dalam Berry, 2003 : 105) mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Harapan – harapan tersebut merupakan imbangan dari norma – norma social dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban – kewajibannya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajiban dari jabatan atau pekerjaannya. Dalam peran yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Menurut Minterg (dalam Kusnadi, 2005 : 358) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:

- a. Peran peribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun di luar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang berbeda, yaitu:
 - Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi
 - Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai
- b. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*), dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar

bagian antar pegawai yang berbeda dalam lingkupnya, dalam hal ini pemimpin dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:

- Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan ke seluruh bagian organisasi.
 - Sebagai juru bicara.
- c. Peran keputusan (*decision role*), dalam hal ini pemimpin memainkan empat peranan, yaitu peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat juga mempunyai peran membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu pihak kecamatan sebagai pemimpinnya harus menentukan langkah – langkah atau aktivitas-aktivitas yang akan diambil untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Dan langkah – langkah inilah yang disebut dengan program. Siswanto (2005 : 49) mendefinisikan program sebagai serangkaian aktivitas yang relatif luas, yakni menjelaskan:

1. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah.
3. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah.

Menurut Tie (dalam Manulang 2004 : 43) program adalah pedoman atau peraturan yang digariskan bagi tindakan organisasi untuk mencapai tujuan dengan hasil yang baik yang disertai dengan perhitungan biaya yang

diperlukan untuk tindakan tersebut. Sedangkan Terry (2000 : 65) menyatakan program mencakup bagian-bagian yang besar dari sebuah perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2. Pembinaan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, *supervise*, *monitoring*, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dilihat dari segi tujuannya, pembinaan terhadap sebuah organisasi umumnya dimaksudkan agar organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan perannya secara mandiri tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap pihak lain. Dilihat dari segi ini, menurut Tumpal (2004 : 72).

“Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di daerah pedesaan tidaklah harus dimaknai sebagai pengaturan atau lebih tepatnya indoktrinasi terhadap lembaga-lembaga masyarakat desa tersebut, tetapi harus dimaknai sebagai upaya untuk lebih mendayagunakannya agar lebih memiliki kemandirian dan daya tawar terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa yang bersangkutan”.

Sedangkan dalam penjelasan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan kepada memfasilitasi upaya pemberdayaan Otonomi Daerah dan yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan *supervise*. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 217 ayat 1 pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi:

- a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan.
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
- c. Pemberian bimbingan, *supervise*, konsultasi pelaksanaan urusan pelatihan.
- d. Pendidikan dan latihan.
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kusnadi (2005 : 251) menuliskan mengkoordinasikan berarti suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dengan adanya koordinasi kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab dapat dihindari dan merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis, efisien. Semakin besar lingkup

organisasi maka semakin penting koordinasi. Koordinasi menghubungkan kegiatan berbagai macam cabang pekerjaan dan menghindari perselisihan paham atau kepentingan.

Dalam pembinaan diberikan pedoman dan standar yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pandangan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat dan dapat pengarahan merupakan pelengkap bagi pedoman tertulis yang seringkali masih memerlukan penjelasan dimana jika hanya melalui pedoman tertulis saja pegawai tidak mudah mengerti dan memahami pedoman yang diberikan.

Menurut Kusnadi (2005 : 246) pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu di tingkatkan keahliannya, pengetahuannya atau sikapnya guna memperlancar tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelatihan tersebut menggunakan metode berikut ini;

- a. *On the job training*, peserta pelatihan dengan tugas spesifik dari suatu lingkungan kerja yang sesungguhnya.
- b. *Of the job training*, peserta pelatihan tidak dilatih untuk bertindak pada lingkungan kerja sesungguhnya akan hanya diberi penjelasan.

- c. *Apprentice program* yaitu gabungan dari metode di atas.

Tujuan pelatihan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan dan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin.

Latihan yang dilakukan adalah bagian dari pendidikan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Dan tujuan dari diklat yang dilakukan oleh pegawai negeri adalah:

- a. Mengusahakan perbaikan sikap dan kepribadian pegawai negeri sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan sekarang maupun yang akan dijabatnya.
- b. Meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem penghargaan berdasarkan prestasi kerja dan pengembangan karir pegawai negeri.
- c. Membina kesatuan berfikir dan kesatuan bahasa dikalangan pegawai negeri yang penting untuk kesatuan gerak yang meliputi pembinaan kerjasama.
- d. Melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai negeri yang meliputi pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan keterampilan.
- e. Menunjang pelaksanaan program-program pembangunan.

Dengan demikian pelaksanaan diklat merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan agar karir pegawai dapat berkembang.

B. Konsep Operasional

1. Pemerintahan adalah proses penyediaan dan distribusi layanan publik yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan.
2. Pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten Bengkalis yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang berfungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan Bengkalis.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat dalam Kecamatan Bengkalis.

5. Pembinaan adalah perilaku yang ditunjukkan oleh camat Bengkalis dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi pemberian pedoman, standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas, perencanaan, bimbingan, dan supervise.
6. Program Pembinaan adalah langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Bengkalis dalam pemberdayaan otonomi daerah berdasarkan PP 72 tahun 2005 tentang Desa.
7. Pemberian Pedoman adalah pemberian acuan tertulis oleh pemerintah kecamatan Bengkalis dalam melaksanakan tugas pemerintah desa seperti pedoman administrasi, pembangunan dan pemerintahan.
8. Standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas adalah satuan pengukuran yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Bengkalis seperti jam masuk kantor, jam keluar kantor dan administrasi biaya.
9. Perencanaan adalah pengendalian rencana pembangunan desa di kecamatan Bengkalis yang diperoleh dari musyawarah pembangunan desa seperti menampung hasil perencanaan pembangunan desa dari Musrembangdes, merumuskan perencanaan pembangunan desa melalui rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan (UDKK), dan mengusulkan hasil UDKK ke Bupati.
10. Bimbingan merupakan pelengkap bagi pedoman tertulis yang diberikan oleh pemerintah kecamatan Bengkalis seperti memberikan bimbingan

pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan desa (termasuk memberikan pendidikan dan latihan) dan pada tahap pembuatan laporan.

11. Supervisi adalah pengawasan pemerintah kecamatan Bengkalis baik langsung melalui kunjungan ke desa ataupun tidak langsung dengan meminta laporan baik lisan ataupun tertulis.
12. Bentuk pembinaan adalah memberikan pengarahan ketika rapat bulanan, penyuluhan dan memberikan pendidikan latihan.

C. Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan definisi suatu konsep secara operasional sehingga konsep tersebut dapat diukur atau dengan kata lain merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel tersebut bisa dikerjakan dengan baik.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indicator	Item yang diminta	Skala
Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum, evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. (PP No. 72 tahun 2005 tentang desa)	Pembinaan	<p>1. Pemberian pedoman</p> <p>2. Standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas</p> <p>3. Perencanaan</p> <p>4. Bimbingan</p> <p>5. Supervisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memberi pedoman administrasi - pedoman pembangunan - pedoman pemerintah - menetapkan jam masuk kantor - menetapkan jam keluar kantor - menetapkan biaya administrasi - menampung hasil perencanaan desa dan musrembangdes - merumuskan perencanaan pembangunan desa melalui rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan - mengusulkan hasil rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan ke Bupati - tahap pelaksanaan pembangunan - tahap pembuatan laporan - pengawasan langsung melalui kunjungan ke desa - pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan 	Ordinal

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

D. Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran atas variabel dan indikator pembinaan. Teknik pengukuran tersebut antara lain :

Pelaksanaan program pembinaan kriteria pengukurannya adalah :

Baik : Apabila semua kriteria indikator pembinaan dapat terlaksana secara baik dengan ukuran $\geq 67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik : apabila semua kriteria indikator dapat terlaksana dengan ukuran 34 – 66 % dari jawaban responden

Kurang Baik : apabila semua kriteria indikator dapat terlaksana dengan ukuran $\leq 33\%$ dari jawaban responden

Adapun untuk indikator pembinaan teknik pengukurannya sebagai berikut :

1. Pemberian Pedoman

Baik : apabila semua sub kriteria pemberian pedoman ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran $\geq 67\%$ dari jawaban responden

Cukup Baik : apabila semua sub kriteria pemberian pedoman ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran 33 - 66 % dari jawaban responden

Kurang Baik : apabila semua sub kriteria pemberian pedoman ada dan dapat dipedomani secara baik dengan ukuran ≤ 33 % dari jawaban responden

1. Standar waktu dan biaya

Baik : apabila semua kriteria sub indikator Standar waktu dan biaya dapat dijalankan dan bersifat transparan dengan ukuran ≥ 67 % dari jawaban responden

Cukup Baik : apabila semua kriteria sub indikator Standar waktu dan biaya dapat dijalankan dan bersifat transparan dengan ukuran 34 – 66 % dari jawaban responden

Kurang Baik : apabila semua kriteria sub indikator Standar waktu dan biaya dapat dijalankan dan bersifat transparan dengan ukuran ≤ 33 % dari jawaban responden

3. Perencanaan

Baik : apabila semua kriteria sub indikator perencanaan dapat terlaksana secara baik dengan ukuran ≥ 67 % dari jawaban responden

Cukup Baik : apabila semua kriteria sub indikator perencanaan dapat terlaksana secara baik dengan ukuran 33 - 66 % dari jawaban responden

Kurang Baik : apabila semua kriteria sub indicator perencanaan dapat terlaksana secara baik dengan ukuran ≤ 33 % dari jawaban responden

4. Bimbingan

Baik : apabila semua kriteria sub indicator bimbingan dapat terlaksana secara baik dengan ukuran ≥ 67 % dari jawaban responden

Cukup Baik : apabila semua kriteria sub indicator bimbingan dapat terlaksana secara baik dengan ukuran 33 – 66 % dari jawaban responden

Kurang Baik : apabila semua kriteria sub indicator bimbingan dapat terlaksana secara baik dengan ukuran ≤ 33 % dari jawaban responden

5. Supervisi

Baik : apabila semua kriteria sub indicator supervisi dapat terlaksana dengan ukuran ≥ 67 % dari jawaban responden

Cukup Baik : apabila semua kriteria sub indicator supervisi dapat terlaksana dengan ukuran 33 – 66 % dari jawaban responden

Kurang Baik : apabila semua kriteria sub indicator supervisi dapat terlaksana dengan ukuran ≤ 33 % dari jawaban responden

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian *Survey Deskriptif* yaitu informasi yang diperoleh dari responden akan dijelaskan sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis karena penulis menemukan gejala pelaksanaan pembinaan desa yang dilakukan oleh Camat belum efektif. Kecamatan ini merupakan kecamatan induk yang sudah ada sejak tahun 1950, dan saat ini sudah dimekarkan 9 kecamatan. Kecamatan Bengkalis mempunyai 20 Desa. Oleh karena itu, penulis membatasi lokasi penelitian hanya 8 Desa dan 2 Kelurahan yakni Desa Sungai Alam, Desa Air Putih, Desa Pangkalan Batang, Desa Wonosari, Desa Penampi, Desa Temeran, Desa Kelemantan, Desa Sekodi dan Kelurahan Kota, Kelurahan Damon karena jumlah penduduknya banyak dibandingkan desa-desa yang lain yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah kecamatan (*Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010*).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kecamatan Bengkalis yang berjumlah 28.708 Jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sedangkan untuk ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi.

Adapun rumus Slovin tersebut adalah :

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi.

e = Kelonggaran sampel (10 %).

1 = Konstanta.

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebesar 28.708, maka dengan besarnya jumlah populasi tersebut adalah dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini maka penulis mengambil sampel dengan batas ketelitian 5 %. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan populasi 28.708 maka di dapatkan sampel sebesar 394, kemudian teknik penarikan sampelnya digunakan secara *Stratified Random Sampling*, yaitu suatu teknik yang digunakan apabila populasi mempunyai unsur tidak homogen dan berstrata secara professional.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan teknik *Stratified Random Sampling* dengan alasan karena jumlahnya cukup banyak dan agar data yang diperoleh lebih akurat dan penulis membatasi hanya 8 Desa dan 2 Kelurahan karena jarak antara desa cukup jauh sehingga penulis mengambil desa yang letaknya dekat dengan kecamatan, cukup dekat dan jauh dari kecamatan, yaitu Kelurahan Kota, Damon sedangkan jauh dari kecamatan, yaitu Desa Kelemantan dan Desa Sekodi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Berdasarkan Kepala Keluarga di Kecamatan Bengkalis

No	Desa/Kelurahan	Populasi	Sampel
1	Kelurahan Kota	914	13
2	Kelurahan Damon	812	12
3	Desa Sungai Alam	1914	27
4	Desa Air Putih	2102	29
5	Desa Pangkalan Batang	3828	53
6	Desa Wonosari	5742	79
7	Desa Penampi	780	11
8	Desa Temeran	3092	43
9	Desa Kelemantan	4687	64
10	Desa Sekodi	4837	66
Jumlah		28708	394

Sumber : Kantor Camat Bengkalis , 2010

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner mengenai penelitian yaitu pembinaan dan indikatornya.
- b. Data Sekunder adalah data yang sudah diolah yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang seperti uraian jabatan, struktur organisasi dan data jumlah penduduk.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan program pembinaan desa.
- b. Wawancara yaitu Tanya jawab peneliti dengan Camat, Sekcam, dan Kasi Pemerintahan guna melengkapi data yang diperoleh dari daftar pertanyaan.
- c. Observasi yaitu pengamatan terhadap kondisi deskriptif pelaksanaan program pembinaan pemerintah desa.
- d. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

G. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data menggunakan teknik deskriptif dimana data-data yang telah diperoleh dikumpulkan dalam bentuk tabel rekapitulasi kemudian dipindahkan dalam bentuk tabel berdasarkan indikator penelitian untuk kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama empat bulan, dimulai dari Februari 2010 dan selesai pada bulan April 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian 2010

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke -															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x															
2	Pelaksanaan UP		x														
3	Perbaikan UP			x	x	x											
4	Perbaikan daftar kuesioner						x	x									
5	Pengurusan rekomendasi penelitian						x										
6	Penelitian lapangan								x	x	x						
7	Penelitian dan analisis data										x	x	x				
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)												x	x			
9	Konsultasi perbaikan skripsi												x	x	x	x	
10	Pelaksanaan ujian skripsi															x	
11	Pengadaan dan penyerahan skripsi															x	x

BAB IV

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BENGKALIS

Kabupaten Bengkalis merupakan satu wilayah pelaksanaan administratif yang langsung dikepalai oleh seorang Bupati, yang melaksanakan fungsinya sebagai Kepala Daerah dalam mengatur serta mengkoordinir berbagai kegiatan administratif tingkat kabupaten dalam kecamatan-kecamatan yang ada.

Berdasarkan gambaran dalam tingkat kecamatan merupakan gambaran bagi ukuran perkembangan maupun kemajuan tingkat kecamatan itu sendiri, karena peningkatan status kecamatan ditentukan oleh kemajuan perkembangan kecamatan maupun masyarakatnya.

Untuk melihat gambaran lokasi penelitian, yakni Kecamatan Bengkalis, sebagai daerah sampel berikut penulis terangkan :

A. Keadaan Geografis

1. Letak dan Luas Kecamatan

Berdasarkan data tahun 2009 Kecamatan Bengkalis mempunyai luas daerah nomor 2 terkecil dari daerah-daerah kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkalis, namun mempunyai jumlah penduduk nomor 3 yang terbanyak setelah Kecamatan Mandau dan Tebing Tinggi. Adapun batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

B. Penduduk dan Mata Pencarian

Penduduk dalam wilayah Kecamatan Bengkalis pada tahun 2009 berjumlah 56.946 jiwa, yang terdiri dari laki – laki 28.895 dan perempuan 28.051 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel komposisi penduduk Kecamatan Bengkalis berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel IV.1 : Komposisi Penduduk Kecamatan Bengkalis berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur (Umur)	Laki – laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 – 6	6024	6330	12354
2.	7 – 12	5610	6143	11753
3.	13 – 18	5171	4227	9398
4.	19 – 24	2517	1952	4469
5.	25 – 30	2111	1905	4016
6.	31 – 36	1906	1881	3787
7.	37 – 42	1335	1524	2859
8.	43 – 48	1255	1318	2573
9.	49 – 54	946	916	1861
10.	55 keatas	2021	1855	3876
	Jumlah	28.2895	28.051	56.946

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Bengkalis penduduk yang paling dominan adalah yang berusia 0 – 6 tahun yang berjumlah 12.354 jiwa,

kemudian golongan penduduk usia 7 – 12 tahun berjumlah 11.753 jiwa, di ikuti golongan penduduk usia 13 – 18 berjumlah 9.398 jiwa.

Adapun mata pencaharian penduduk di Kecamatan Bengkalis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berasal dari usaha pertanian yaitu perkebunan karet dan kelapa, buruh, nelayan, PNS, kerajinan rumah tangga, pedagang dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Bengkalis menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	3374	19,38
2.	Buruh	4315	24,79
3.	Nelayan	2270	13,05
4.	PNS	2294	13,18
5.	Kerajinan RT	224	1,29
6.	Pedagang	2100	12,07
7.	Lain – lain	2827	16,24
	Jumlah	17.404	100

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Dari tabel diatas, diketahui bahwa di Kecamatan Bengkalis mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah bekerja di sektor buruh, dalam hal ini adalah buruh bangunan, buruh industri, buruh tani, buruh kebun yang berjumlah 4315 orang (24,79%), sedangkan mata pencaharian penduduk lainnya adalah yang bekerja sebagai Petani 3374 orang (19,38%), PNS 2294 orang (13,18%), Nelayan 2270 orang

(13,05%), Pedagang 2100 orang (12,07%), Kerajinan RT 224 orang (1,24%) dan lain-lain 2827 orang (16,24%).

C. Pendidikan dan Agama

Masalah pendidikan di Negara kita sangat penting sekali, ini terbukti dari perhatian pemerintah yang dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran”, ayat 2 yang berbunyi : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Dengan demikian pendidikan merupakan terobosan dari kebodohan menuju kemajuan yang positif. Begitu juga dengan sarana pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk tercapainya masa depan yang lebih baik, karena sarana pendidikan merupakan tempat belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Karena itu rendahnya kemajuan suatu masyarakat turut ditentukan oleh pengadaan sarana pendidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bengkalis di bawah ini :

Tabel IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Bengkalis

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	5
2.	SD Negeri	55
3.	MI	3
4.	SD Swasta	4
5.	SLB	1
6.	MTsN	1
7.	SLTP Negeri	6
8.	SLTP Swasta	1
9.	SLTA Negeri	3
10.	SMK	2
11.	Perguruan Tinggi Swasta	5
Jumlah		83

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Berdasarkan tabel diatas bahwa banyaknya sarana pendidikan di Kecamatan Bengkalis secara keseluruhan berjumlah 83 buah, yang terdiri dari TK 5 buah, SD sederajat 62 buah, SLB 1 buah, SLTP sederajat 8 buah, SLTA sederajat 5 buah, dan Perguruan Tinggi Swasta 2 buah.

Selanjutnya dilihat dari agama yang dianut maka penduduk di Kecamatan Bengkalis dapat digolongkan mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut di
Kecamatan Bengkalis**

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	46.548
2.	Khatolik	527
3.	Protestan	886
4.	Hindu	5
5.	Budha	8.981
Jumlah		56.946

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa penduduk di Kecamatan Bengkalis mayoritas beragama Islam yang berjumlah 46.548 orang, diikuti oleh agama Budha 8.981 orang, kemudian Kristen Protestan 885 orang dan Kristen Khatolik 527 orang dan Hindu sebanyak 5 orang.

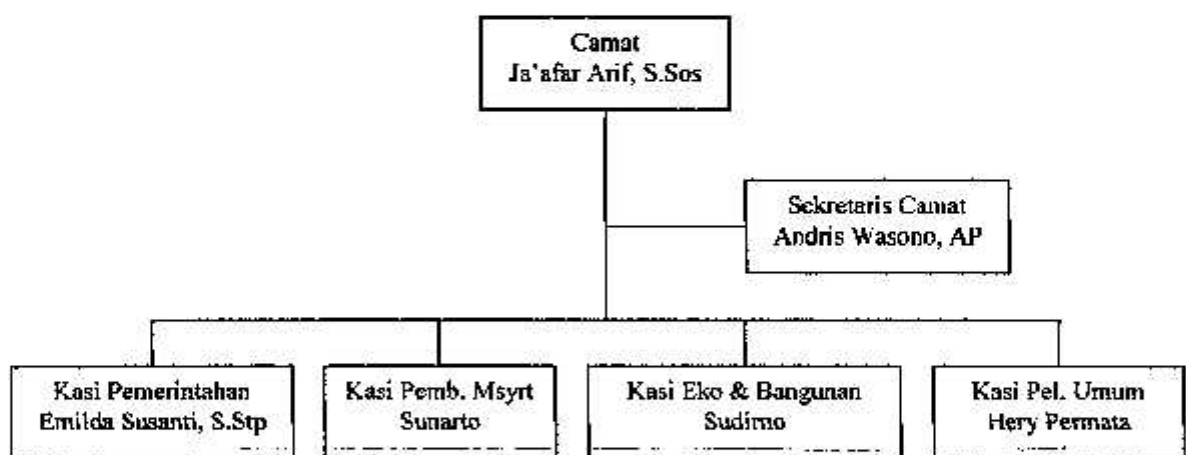
D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian, yaitu proses pengelompokkan orang-orang, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga terwujud organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan, hasilnya beberapa struktur organisasi yang menggambarkan hubungan formal dalam arti para anggota berhubungan secara kedinasan yang sudah diatur oleh tata tertib organisasi seperti siapa menjadi atasan, siapa yang menjadi

bawahan, apa wewenang, tugas dan kewajiban masing-masing. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yaitu bagan struktur yang menggambarkan jenjang jabatan, pola hubungan kerja, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab setiap orang atau bagian serta kedudukan masing-masing dalam suatu organisasi.

Bagan organisasi Kecamatan Bengkalis berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Bengkalis



Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa bagan organisasi terbentuk lini dan staf. Pada organisasi ini disamping ada petugas lini (koamndo) yang langsung melakukan pencapaian tujuan, ada pula tenaga staf yang memberi bantuan kepada petugas lini untuk memperlancarkan pencapaian tujuan organisasi ini.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan di atas berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2008 adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat memiliki fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Pembinaan dan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan ketentraman dan ketertiban serta pembinaan pamong praja.
- c. Perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi bidang perekonomian, pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan kesejahteraan.
- e. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan umum meliputi administrasi kependudukan dan ketertiban.

- f. Pembinaan dan pengawasan dalam bidang administrasi meliputi ketatausahaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan.
- b. Urusan administrasi keuangan, dan
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan.
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

- c. Penyusunan program dan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peran wanita dan olahraga.
- b. Penyusunan program, pembinaan, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, melaksanakan pembinaan di bidang pembangunan, perekonomian, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan di bidang pembangunan perekonomian dan produksi dan distribusi.

- b. Penyusunan program dan pembinaan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan umum, kebersihan, administrasi kependudukan dan proses perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan administrasi penduduk.
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, sanitasi lingkungan.
- d. Penyusunan program penyelenggaraan pembinaan proses perizinan.

E. Gambaran Desa Sampel

Kecamatan Bengkalis mempunyai 17 desa dan 3 kelurahan, akan tetapi penulis membatasi lokasi penelitian hanya 10 desa dan kelurahan karena jumlahnya terlalu banyak. Desa yang penulis jadikan sampel adalah Kelurahan Kota, Desa Sungai Alam, Desa Air Putih, Desa Penampi, Desa Temeran, Desa Penebal, Desa Permatan Duku, Desa Ketam Putih, Desa Kelemantan, dan Desa Sekodi. Desa – desa

ini terkategori desa swakarya. Desa – desa ini sebagian besar mempunyai penduduk yang cukup banyak. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Desa Sampel di Kecamatan Bengkalis

No.	Nama Desa	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bengkalis Kota			
2	Sungai Alam	2229	2020	4249
3	Air Putih	1198	1152	2350
4	Penebal	881	811	1693
5	Temeran	1308	1311	2619
6	Penampi	1263	1017	2280
7	Permatan Duku	1528	1659	3187
8	Ketam Putih	1611	1536	3147
9	Kelemantan	971	941	1914
10	Sekodi	1359	1242	2601

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah penduduk desa sampel di atas berkisar 2000 jiwa. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki lebih banyak di bandingkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan untuk setiap desa. Sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, dan sebagian kecil yang lain berdagang, buruh, nelayan, PNS.

F. Keadaan Desa di Kecamatan Bengkalis

1. Profil Desa

a. Keadaan Desa

Dilihat dari alamnya, jenis tanah di desa – desa Kecamatan Bengkalis terdiri dari tanah liat putih lebih kurang 60% dari wilayah, kemudian juga terdiri dari tanah gambut organosol 20% dari luas wilayah, kemudian tanah endapan 20% di sepanjang pesisir pantai.

Selanjutnya wilayah desa Kecamatan Bengkalis beriklim tropis tipe AFI dengan rata – rata curah hujan satu tahun 2.974 mm, dengan curah hujan lebih kurang 107 hari, dengan temperatur 20⁰C sampai dengan 30⁰C dengan tiga musim, yakni musim panas dan musim hujan disertai musim pancaroba (musim panas disertai musim hujan)

b. Sosial Budaya

Di bidang sosial budaya di Kecamatan Bengkalis terdapat kesenian seperti Zapin, Berzanji, Marhaban, Rebbana, serta Kompong. Kemudian peninggalan sejarah Masjid Istiqomah, Balai Adat, dan Makam Panglima Minal.

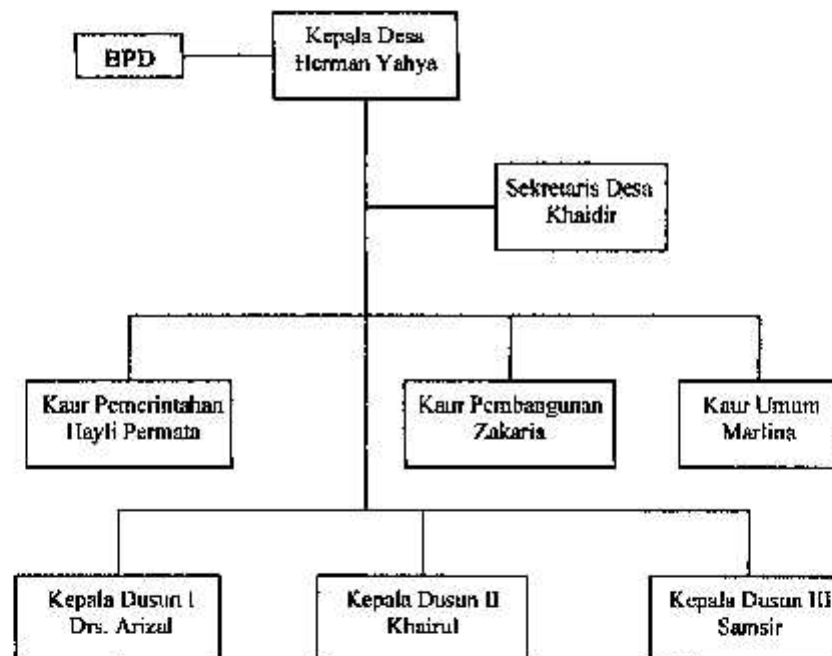
2. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan BPD. Sedangkan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa

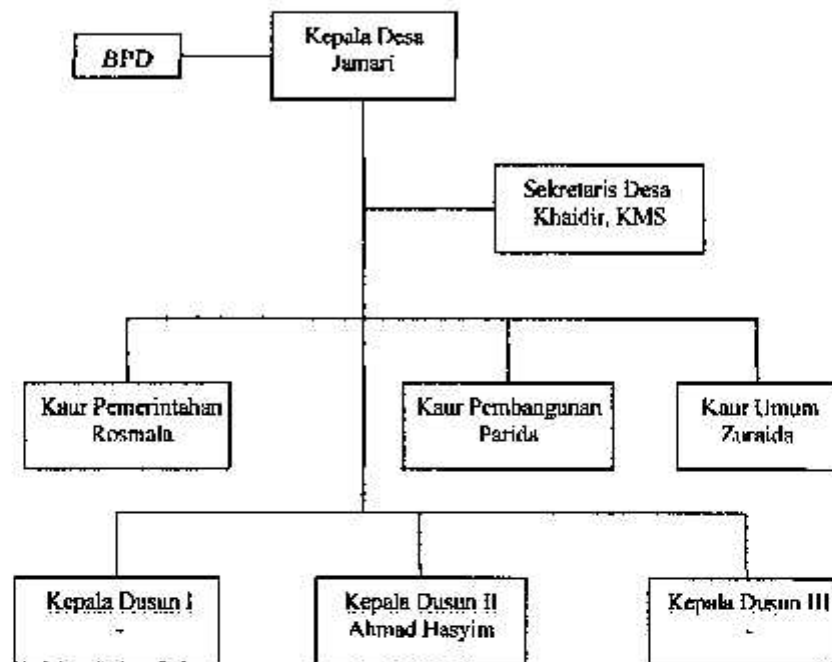
yang dimaksud terdiri dari sekretaris desa, pelaksana lapangan dan unsur kewilayahan. Pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Adapun bagan organisasi pemerintahan desa di Kecamatan Bengkalis adalah :

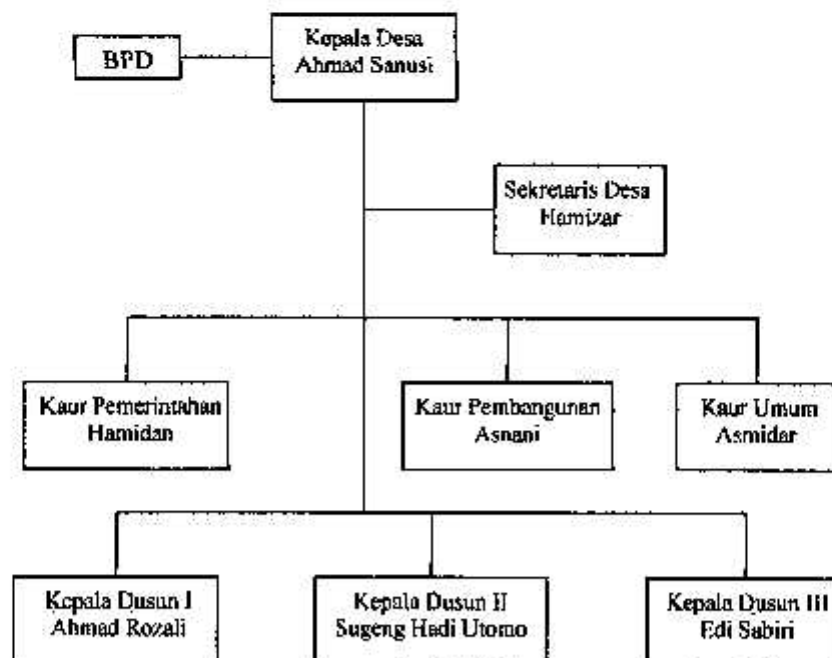
Gambar IV.2 : Struktur organisasi Pemerintahan Desa Sungai Alam



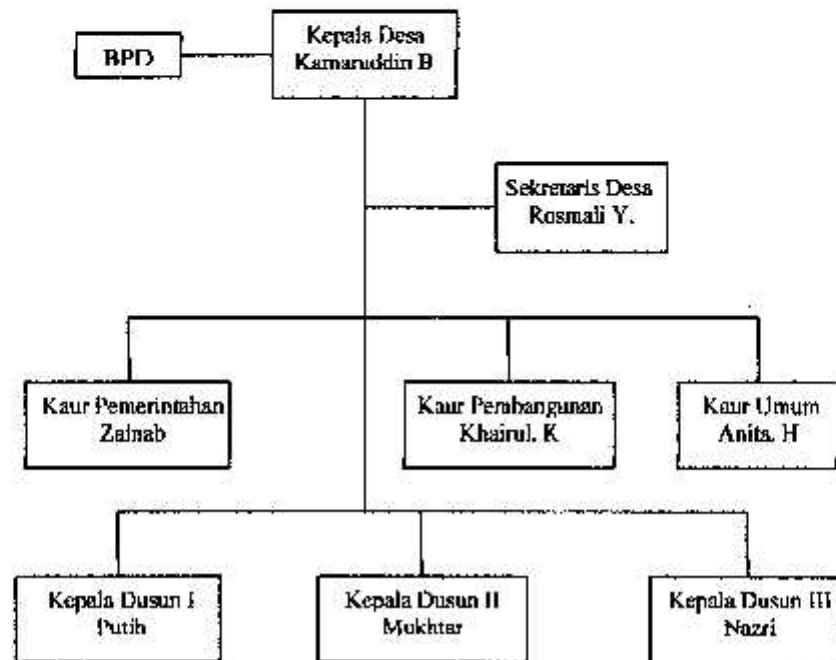
Gambar IV.3 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Air Putih



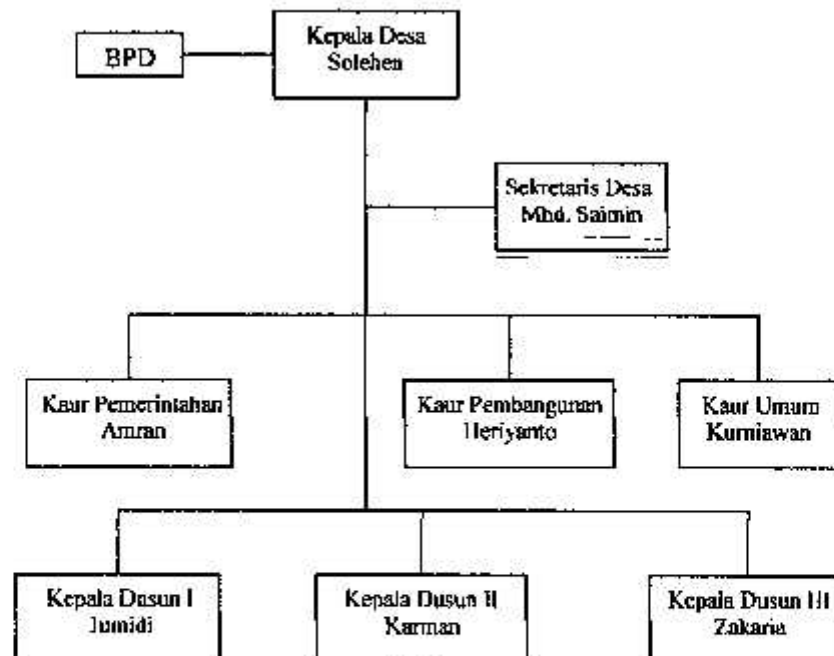
Gambar IV.4 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Penampi



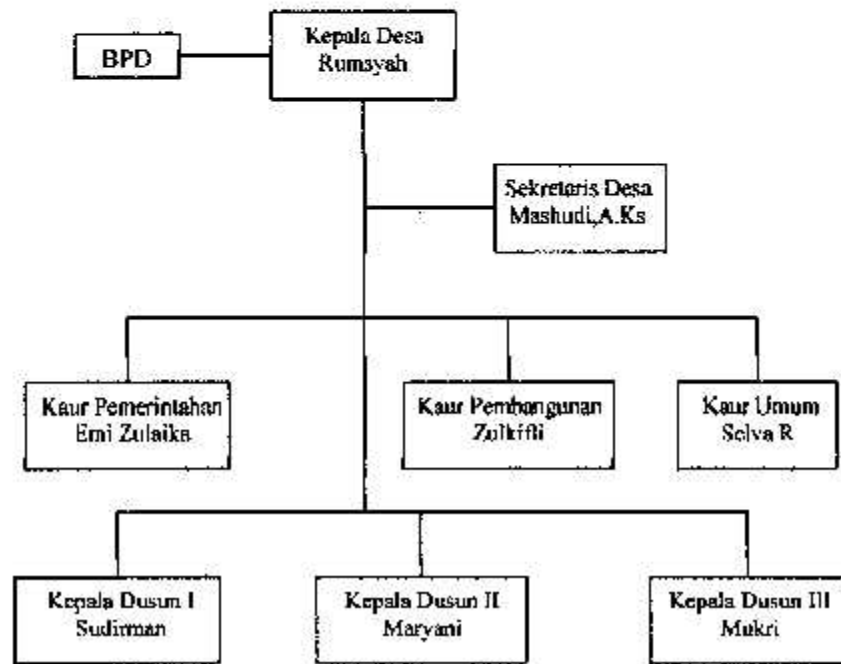
Gambar IV.5 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Temeran



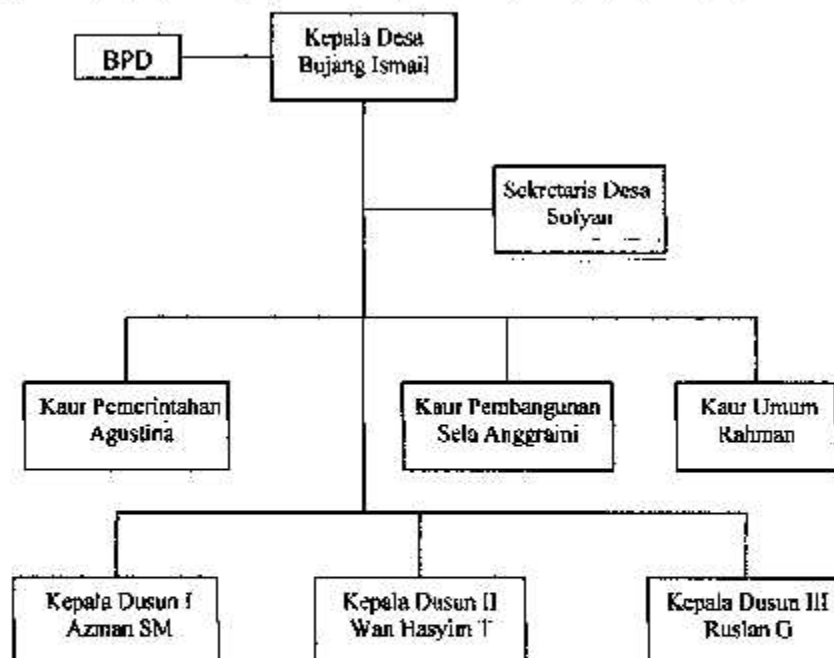
Gambar IV.6 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Penehal



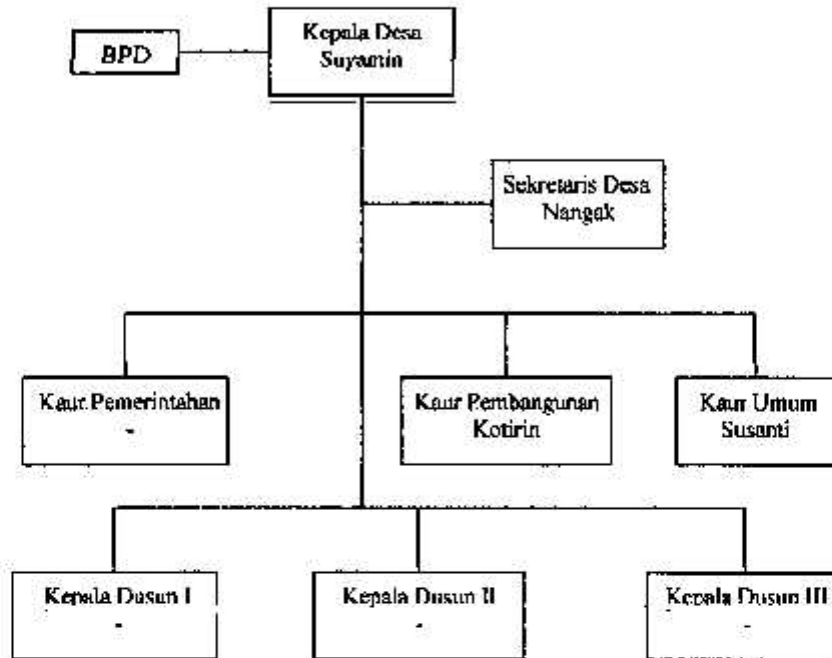
Gambar IV.7 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Permatan Duku



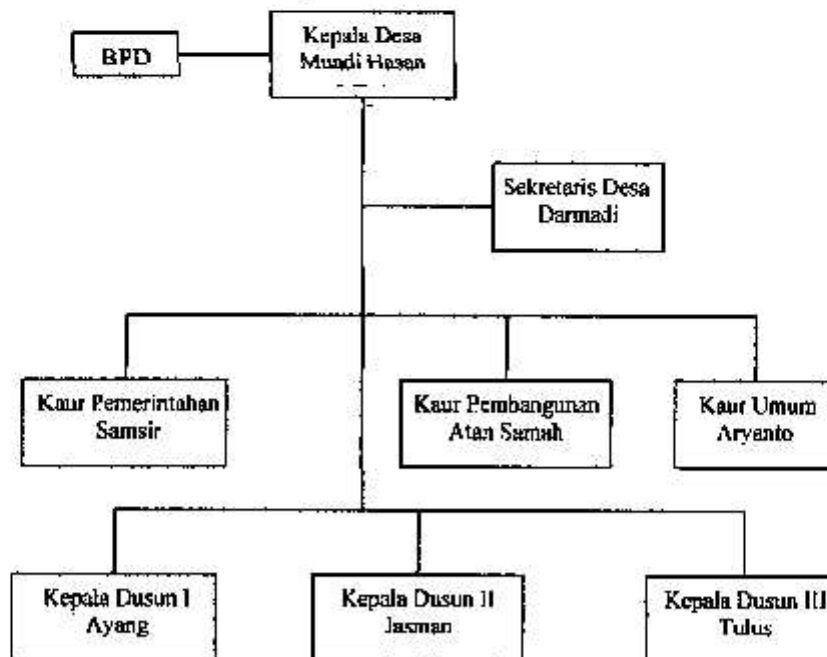
Gambar IV.8 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ketam Putih



Gambar IV.9 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kelemantan



Gambar IV.10 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sekodi



Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa bagan organisasi berbentuk lini dan staf. Pada organisasi ini disamping ada petugas lini (komando) yang langsung melakukan kegiatan pencapaian tujuan, apabila tenaga staf yang memberikan bantuan kepada petugas lini untuk melancarkan pencapaian tujuan organisasi ini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Ketua BPD dan LPM, serta Kepala Dusun. Identitas responden yang akan diidentifikasi terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan dan masa kerja.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin bagi tenaga kerja dapat menjadi pertimbangan bagi staf atau jenis pekerjaan yang diberikan, dan waktu. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perempuan	2	4,4
2	Laki-laki	43	95,6
	Jumlah	45	100

Sumber : Penelitian Lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 43 responden atau sebesar 95,6 % berjenis kelamin Laki-laki. Tugas yang dijabat responden tersebut pada umumnya merupakan tugas yang menuntut untuk banyak bekerja di luar kantor dan memang lebih sesuai jika dilakukan oleh Laki-laki, seperti tugas seorang camat yang menuntut untuk meninjau desa-desa yang menjadi wilayah tanggung jawabnya dan sekretaris kecamatan yang harus selalu menyertai camat dalam

melaksanakan tugasnya. Selanjutnya sebanyak 2 responden berjenis kelamin perempuan atau sebesar 4,4 %.

2. Usia

Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Klasifikasi responden penelitian berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	21 – 30	12	27
2	31 – 40	11	24
3	41 – 50	19	42
4	≥ 51	3	7
	Jumlah	45	100

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian sebagian besar usianya berkisar antara 41 – 50 tahun yakni sebanyak 19 orang responden atau sebesar 42 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang berusia 51 tahun keatas yakni sebanyak 3 orang. Artinya usia sebagian besar responden penelitian matang dan seharusnya mereka cukup baik dalam melaksanakan pekerjaan.

3. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang telah dijalani oleh responden. Pendidikan formal dapat berpengaruh terhadap pengetahuan umum atau pengetahuan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga berpengaruh terhadap cara atau waktu dalam memenuhi

tanggung jawabnya. Klasifikasi responden penelitian berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	1	2
2	SMP	8	18
3	SMA	29	65
4	Strata Satu (S-1)	6	13
5	Strata Dua (S-2)	1	2
	Jumlah	45	100

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya 1 orang responden mempunyai tingkat pendidikan SD, 8 orang berpendidikan SMP, 29 orang berpendidikan SMA, 6 orang berpendidikan S1, dan hanya 1 orang berpendidikan S2. Artinya sebagian besar responden mempunyai tingkat pendidikan SMA sebanyak 29 orang responden atau sebesar 65% dan mereka bekerja sebagai aparat pemerintahan desa.

4. Masa Kerja

Masa kerja yang dimaksud adalah masa kerja pada jabatan yang dijabat. Masa kerja dapat berpengaruh terhadap keahlian dalam menyelesaikan pekerjaan, oleh karena itu seharusnya orang yang lebih lama masa kerjanya seharusnya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang masa kerjanya lebih singkat. Klasifikasi responden penelitian berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 3	9	20
2	3 – 7	17	38
3	> 8	19	42
	Jumlah	45	100

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 9 orang memiliki masa kerja dibawah 3 tahun, 17 orang memiliki masa kerja 3 – 7 tahun dan sebagian besar responden mempunyai pengalaman kerja di atas 7 tahun yakni sebanyak 19 orang responden atau 42 %. Artinya sebagian besar responden sudah berpengalaman dalam bekerja, dengan adanya pengalaman dan pengetahuan yang bertambah tersebut seharusnya seluruh pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik.

B. Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Desa Oleh Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Bengkalis

Pemerintah adalah badan yang menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dalam system NKRI. Pedelegasian urusan pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan azas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah propinsi

kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dengan tugas pembantuan tersebut maka pemerintah kabupaten/kota dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat dan dibentuk dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 126 ayat 3 bahwa tugas umum pemerintah kecamatan adalah membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Dalam peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 98 disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Pembinaan adalah proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan penerima akhir (masyarakat) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. PP No. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 1 ayat 15 menyebutkan bahwa pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, diklat, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penelitian ini indikator pembinaan oleh pemerintah kecamatan kepada desa yang diteliti meliputi pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, bimbingan, dan *supervise*.

1. Pemberian Pedoman

Pedoman adalah acuan tertulis yang bersifat umum dalam melaksanakan tugas. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pedoman mendefinisikan sebagai kumpulan ketentuan dasar yang memberikan arah bagaimana sesuatu dilakukan. Dari definisi ini maka suatu organisasi baik privat maupun public ketika ingin mencapai tujuan tertentu sangat memerlukan pedoman. Begitu juga dengan pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat yang berada di bawah kecamatan ketika melaksanakan pembangunan desa memerlukan pembinaan dari pemerintah kecamatan sebagai perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota, salah satunya adalah pemberian pedoman yakni pedoman administrasi, pedoman pembangunan, pedoman pemerintahan.

1.1. Memberikan Pedoman Menurut Pedoman

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemerintah kecamatan (camat, sekretaris kecamatan dan kasi pemerintahan) sebagai unsur Pembina pemberian pedoman dapat terlaksana dengan baik karena mereka menyatakan memberikan pedoman berupa pedoman administrasi, pembangunan dan pedoman pemerintahan kepada pemerintah desa. Untuk lebih jelasnya bagaiman hasil wawancara dengan unsur Pembina dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5 : Jawaban Responden Unsur Pembina tentang Pemberian Pedoman Pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Memberikan pedoman administrasi	35	9	3
2	Memberikan pedoman pembangunan	20	8	5
3	Memberikan pedoman pemerintahan	25	5	-
	Persentase (%)	70	22	8
	Standar Kategori	≥ 67%		
	Kriteria	Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum pemberian pedoman yang diberikan oleh pemerintah kecamatan yang memberikan jawaban baik sebanyak 70 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 22 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik 8 %.

Dari tabel diatas bahwa unsur pembina tentang pemberian pedoman administrasi, pedoman pembangunan, dan pedoman pemerintahan kepada pemerintah desa dikatakan baik.

1.2. Memberikan Pedoman Menurut Unsur yang Dibina

Berikut adalah jawaban dari unsur yang dibina tentang pemberian pedoman.

Tabel V.6 : Jawaban Responden Unsur yang Dibina tentang Pemberian Pedoman oleh Pemerintah Kecamatan Pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Memberikan pedoman administrasi	15	10	5
2	Memberikan pedoman pembangunan	12	15	3
3	Memberikan pedoman pemerintahan	20	20	-
	Persentase (%)	47	45	8
	Standar Kategori	34 – 66 %		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemberian pedoman oleh pemerintah kecamatan yang memberikan jawaban baik sebanyak 47 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 45 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 8 %.

Darti tabel diatas bahwa yang memberikan pedoman menurut unsur yang dibina oleh pemerintah kecamatan yang dikategorikan cukup baik.

1.3. Memberikan Pedoman Menurut Pembina dan yang Dibina

Tabel V.7 : Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Pemberian Pedoman pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Memberikan pedoman administrasi	18	25	2
2	Memberikan pedoman pembangunan	27	18	-
3	Memberikan pedoman pemerintahan	29	15	1
	Persentase (%)	55	43	2
	Standar Kategori	34 – 66 %		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum pemberian pedoman menurut Pembina dan yang dibina yang memberikan jawaban baik sebanyak 55 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 43 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 2 %.

Dari tabel diatas bahwa memberikan pedoman menurut Pembina dan yang dibina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan cukup baik karena jawaban responden sebanyak 55 % atau berada 43 – 66 %.

2. Standar Waktu dan Biaya Pelaksanaan Tugas

Standar adalah kriteria yang sederhana untuk prestasi kerja yakni titik-titik terpilih di dalam seluruh program perencanaan untuk mengukur prestasi kerja tersebut guna memberikan tanda tentang perkembangan yang terjadi dalam organisasi. Alat penilai atau standar hasil pekerjaan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai atau standar yang digunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Agar alat penilai itu harus dikemukakan dan dijelaskan kepadanya agar bawahan mengetahui apa yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan untuk mencapai maksud yang sama yakni bawahan memahami standar yang digunakan. Standar tersebut harus dikembangkan atas dasar bersama. Dalam penelitian ini indikator dari penetapan standar adalah waktu (jam masuk kantor dan jam keluar kantor) dan biaya pelaksanaan tugas.

2.1. Menetapkan Standar Waktu dan Biaya Pelaksanaan Tugas menurut Pembina

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur Pembina bahwa standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik karena mereka menyatakan standar waktu seperti menetapkan jam masuk dan keluar kantor serta menetapkan biaya pelaksanaan tugas. Untuk lebih jelasnya bagaimana hasil wawancara dengan Pembina mengenai penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas.

Tabel V.8 : Jawaban Responden Unsur Pembina tentang Penetapan Standar Waktu dan Biaya Pelaksanaan Tugas pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Menetapkan jam masuk kantor	17	20	5
2	Menetapkan jam keluar kantor	18	15	8
3	Menetapkan biaya administrasi	10	7	-
	Persentase (%)	45	42	13
	Standar Kategori	34 – 66 %		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum penetapan standar yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 45 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 42 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 13 %.

Dari tabel diatas bahwa unsur Pembina tentang penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas pada kecamatan dikategorikan cukup baik karena jawaban responden sebanyak 45 % atau berada 34 – 66 %.

2.2. Menetapkan Standar Waktu dan Biaya Menurut yang Dibina

Standar yang ditetapkan sebagai ukuran dalam pelaksanaan tugas harus diketahui oleh bawahan dalam arti pimpinan dan bawahan harus memiliki persepsi yang sama terhadap standar kerja yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah jawaban responden pemerintah desa dan masyarakat mengenai pelaksanaan penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas.

Tabel V.9 : Jawaban Responden Unsur yang Dibina tentang Penetapan Standar Waktu dan Biaya Pelaksanaan Tugas pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Menetapkan jam masuk kantor	25	15	-
2	Menetapkan jam keluar kantor	20	13	-
3	Menetapkan biaya administrasi	16	8	3
	Persentase (%)	61	36	3
	Standar Kategori	≥ 67%		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan standar waktu dan biaya menurut yang dibina oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 61 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 36 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 3 %.

Dari tabel diatas bahwa penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan di kategorikan cukup baik jawaban responden sebanyak 61 % atau berada 34 – 66 %.

2.3. Menetapkan Standar Menurut Pembina dan yang Dibina

Untuk mengetahui jawaban semua responden mengenai penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas oleh pemerintah kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Penetapan Standar Waktu dan Biaya Pelaksanaan Tugas Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Menetapkan jam masuk kantor	20	7	3
2	Menetapkan jam keluar kantor	22	6	4
3	Menetapkan biaya administrasi	25	9	4
	Persentase (%)	67	22	11
	Standar Kategori	≥ 67%		
	Kriteria	Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 67 %, yang memberikan cukup baik sebanyak 22 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 11 %.

Dari tabel diatas bahwa penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas oleh kecamatan dikategorikan baik jawaban responden sebanyak 67 %.

3. Perencanaan

Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang mengenai hal mengivensualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan. Dalam organisasi banyak orang yang perlu diberikan informasi dan turut berpartsifasi dalam melaksanakan pekerjaan yang akan datang, maka perencanaan menjadi suatu keharusan.

Pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu Bupati salah satunya dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kecamatan dalam membina masyarakat mengendalikan perencanaan pembangunan desa seperti menampung hasil perencanaan pembangunan desa dalam Musrembangdes, merumuskan perencanaan pembangunan desa melalui rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan dan mengusulkan hasil rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan (UDKK) ke Bupati.

3.1. Perencanaan Menurut Pembina

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan sebagai unsur Pembina bahwa indikator perencanaan dapat terlaksanaan dengan baik karena mereka menampung, merumuskan rencana pembangunan desa dan mengusulkannya ke Bupati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V.11 : Jawaban Responden Unsur Pembina tentang Perencanaan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Menampung hasil perencanaan pembangunan desa melalui Musbangdes	20	15	-
2	Merumuskan perencanaan pembangunan desa melalui rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan (UDKK)	25	-	-
3	Mengusulkan hasil UDKK ke Bupati	30	10	-
	Persentase (%)	75	25	-
	Standar Kategori	> 67%		
	Kriteria	Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unsur pembina tentang perencanaan oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 75 %, yang

memberikan jawaban cukup baik sebanyak 25 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik 0 %.

Dari tabel diatas bahwa perencanaan menurut pembina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan baik karena jawaban responden sebanyak 75 %.

3.2.Perencanaan Menurut yang Dibina

Berikut ini adalah tanggapan dari unsur yang dibina mengenai perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah kecamatan.

Tabel V.12 : Jawaban Responden Unsur yang Dibina tentang Perencanaan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Menampung hasil perencanaan pembangunan desa melalui Musbangdes	25	10	-
2	Merumuskan perencanaan pembangunan desa melalui rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan (UDKK)	30	10	-
3	Mengusulkan hasil UDKK ke Bupati	18	7	-
	Persentase (%)	73	27	-
	Standar Kategori	34 – 66 %		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unsur yang dibina tentang perencanaan pembangunan oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 73 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak dikategorikan cukup baik sebanyak 27 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 0 %.

Dari tabel dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan menurut yang dibina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan baik karena responden memberikan jawaban sebanyak 73 %.

3.3.Perencanaan Menurut Pembina dan yang Dibina

Berikut ini adalah jawaban dari unsur Pembina dan unsur yang dibina mengenai perencanaan.

Tabel V.13 : Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Perencanaan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Menampung hasil perencanaan pembangunan desa melalui Musbangdes	35	10	-
2	Merumuskan perencanaan pembangunan desa melalui rapat Unit Daerah Kerja Kecamatan (UDKK)	18	17	-
3	Mengusulkan hasil UDKK ke Bupati	20	-	-
	Persentase (%)	73	27	-
	Standar Kategori	$\geq 67\%$		
	Kriteria	Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 73 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 27 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 0 %.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perencanaan pembangunan menurut Pembina dan yang dibina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan baik jawaban responden sebanyak 73 %.

4. Bimbingan

Bimbingan merupakan pelengkap bagi pedoman tertulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan diartikan petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Pimpinan harus memberikan bimbingan kepada bawahannya

ketika menemui kendala dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Dalam hal ini pemerintah kecamatan sebagai Pembina pemerintah desa harus memberikan bimbingan kepada pemerintah desa. Bimbingan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan meliputi bimbingan pada tahap pelaksanaan pembangunan desa (seperti memberikan pendidikan dan latihan) dan pada tahap pembuatan laporan.

4.1.Bimbingan Menurut Pembina

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan sebagai unsur Pembina bahwa bimbingan dapat terlaksana dengan baik karena mereka menyatakan memberikan bimbingan pada tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap pembuatan laporan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.14 : Jawaban Responden Unsur Pembina tentang Bimbingan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Bimbingan pada tahap pelaksanaan pembangunan	35	8	5
2	Bimbingan pada tahap laporan	40	9	3
	Persentase (%)	75	17	8
	Standar Kategori	> 67 %		
	Kriteria	Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unsur Pembina tentang pemberian bimbingan oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 75 %, yang memberikan jawaban sebanyak 17 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 8 %.

Dari tabel diatas bahwa bimbingan menurut unsur Pembina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan baik jawaban responden sebanyak 75 %.

4.2. Bimbingan Menurut yang Dibina

Berikut ini adalah jawaban responden yang dibina tentang bimbingan :

Tabel V.15 : Jawaban Responden Unsur yang Dibina tentang Bimbingan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Bimbingan pada tahap pelaksanaan pembangunan	40	18	-
2	Bimbingan pada tahap laporan	32	10	-
	Persentase (%)	72	28	-
	Standar Kategori	$\geq 67\%$		
	Kriteria	Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bimbingan menurut pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai unsur yang dibina oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 72 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 28 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 0 %.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bimbingan menurut unsur yang dibina oleh pemerintah kecamatan baik memberikan responden sebanyak 72 %.

4.3. Bimbingan Menurut Unsur Pembina dan yang Dibina

Berikut ini adalah jawaban responden tentang pemberian bimbingan :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Bimbingan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Bimbingan pada tahap pelaksanaan pembangunan	45	10	-
2	Bimbingan pada tahap laporan	35	10	-
	Persentase (%)	80	20	-

Standar Kategori	$\geq 67\%$
Kriteria	Baik

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bimbingan menurut unsur Pembina dan yang dibina pemerintah desa dan masyarakat oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 80 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 20, dan yang memberikan jawaban kurang baik 0 %.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bimbingan menurut unsur pembina dan yang dibina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan baik responden memberikan jawaban sebanyak 80 %.

5. *Supervisi*

Pengawasan adalah suatu proses untuk melihat pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula dengan tujuan mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Meskipun pelaksanaan telah didelegasikan oleh pimpinan kepada bawahannya namun pimpinan perlu mengadakan pengawasan langsung ataupun tidak langsung. Dengan pengawasan langsung pimpinan akan dapat melihat secara langsung pekerjaan bawahannya sedangkan pengawasan tidak langsung memperkuat pengawasan langsung dengan adanya laporan baik lisan ataupun tertulis bagaimana pelaksanaan pekerjaan.

5.1. *Supervisi Menurut Pembina*

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur Pembina bahwa pelaksanaan supervise dapat terlaksana dengan baik karena mereka menyatakan melakukan pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan

pemerintah desa dan aparatnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana hasil wawancara dengan unsur Pembina dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.17 : Jawaban Responden Unsur Pembina tentang Pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Pengawasan langsung	15	15	16
2	Pengawasan tidak langsung	20	20	14
	Persentase (%)	35	35	30
	Standar Kategori	34 – 66 %		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 35 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 35 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 30 %.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan menurut unsur Pembina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan cukup baik responden memberikan jawaban sebanyak 35 % atau berada 34 – 66 %.

5.2. Pengawasan Menurut yang Dibina

Berikut ini jawaban dari unsur yang dibina mengenai pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah kecamatan kepada pemerintah desa :

Tabel V.18 : Jawaban Responden Unsur yang Dibina tentang Pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Pengawasan langsung	15	20	7
2	Pengawasan tidak langsung	18	35	5
	Persentase (%)	33	55	12

Standar Kategori	34 – 66 %
Kriteria	Cukup Baik

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan menurut unsur yang dibina oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 33 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 55 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 12 %.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan menurut unsur yang dibina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan cukup baik jawaban responden sebanyak 55 % atau berada 34 – 66 %.

5.3. Pengawasan Menurut Pembina dan yang Dibina

Berikut ini jawaban dari Pembina dan yang dibina mengenai pelaksanaan pengawasan baik langsung ataupun tidak langsung kepada pemerintah desa :

Tabel V.19 : Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Pengawasan langsung	25	17	6
2	Pengawasan tidak langsung	35	13	4
	Persentase (%)	60	30	10
	Standar Kategori	34 – 66 %		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan menurut unsur Pembina dan yang dibina oleh pemerintah kecamatan, yang memberikan jawaban baik sebanyak 60 %, yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 30 %, dan yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 10 %.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan menurut unsure Pembina dan yang dibina oleh pemerintah kecamatan dikategorikan cukup baik jawaban responden memberikan sebanyak 60 % atau berada 34 – 66 %.

Untuk dapat melihat pelaksanaan program pembinaan desa oleh pemerintah kecamatan Bengkalis dapat dilihat di dalam tabel rekapitulasi berikut :

Tabel V.20 : Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Desa Oleh Pemerintah Kecamatan Bengkalis

No	Item Yang Dinilai	Frekuensi		
		Baik	C. Baik	K. Baik
1	Pemberian pedoman	55	43	2
2	Standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas	67	22	11
3	Perencanaan	73	27	-
4	Pemberian himbungan	80	20	-
5	Supervise	60	30	10
	Jumlah	335	114	23
	Persentase (%)	65	34	2
	Standar Kategori	34 – 66 %		
	Kriteria	Cukup Baik		

Sumber : Penelitian Lapangan, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembinaan oleh pemerintah kecamatan dikategorikan cukup baik dengan persentase dengan 65 % atau berada 34 – 66 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan desa oleh pemerintah kecamatan di kecamatan Bengkalis dikategorikan cukup baik, artinya ada sebagian indicator yang belum terlaksana dengan baik dan ada sebagian indicator yang terlaksana dengan baik seperti penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas dan pengawasan, ini dikarenakan pemerintah kecamatan (camat beserta pegawai kecamatan) telah melaksanakan tugas pembinaan tersebut dengan baik juga dikarenakan adanya kerjasama yang baik dari

pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa di kecamatan Bengkalis. Adapun sebagian indikator pembinaan yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan kekurangpahaman pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam memahami petunjuk dan arahan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan yang menurut jawaban dari pemerintah kecamatan dikarenakan tingkat pendidikan pemerintah desa dan masyarakat sebagian besar hanya setingkat SMA sehingga mereka tidak bisa memahami petunjuk dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan Program Pembinaan Desa Oleh Pemerintah Kecamatan Di Kecamatan Bengkalis dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dari tabel Rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pembinaan Desa berada pada kategori “ Cukup Baik “ dengan rincian dari masing – masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pedoman dapat dikategorikan cukup baik karena kurang dimengerti oleh pemerintah Desa, dan lembaga masyarakat.
2. Penetapan standar waktu dan biaya pelaksanaan tugas dapat dikategorikan baik karena dapat dijalankan dan cukup transparan.
3. Perencanaan dapat dikategorikan cukup baik karena pemerintah desa kurang konsisten dengan apa yang direncanakan.
4. Bimbingan dapat dikategorikan cukup baik karena pemerintah kecamatan belum rutin memberikan bimbingan.
5. Pengawasan dapat dikategorikan baik karena pemerintah kecamatan sudah rutin mengunjungi sebagian besar desa di kecamatan Bengkalis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah kecamatan hendaknya ketika memberikan pedoman kepada pemerintahan desa disertai dengan penjelasannya.
2. menetapkan standar sudah terkategori baik, namun hendaknya kepada pemerintah kecamatan ketika menetapkan standar menggunakan prinsip realistis terutama standar biaya yakni standar tersebut memungkinkan untuk dicapai, disamping itu juga harus disesuaikan dengan beban kerja dan jenis pekerjaan karena ternyata kadang – kadang proyek pembangunan terkendala karena biaya.
3. Pemerintah kecamatan hendaknya rutin memberikan pendidikan dan latihan minimal 3 bulan sekali kepada aparat pemerintah desa dan lembaga masyarakat karena sebagian besar tingkat pendidikan mereka hanya setingkat SMA.
4. Dalam mengevaluasi pekerjaan pemerintah kecamatan hendaknya memberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bagaimana mereka seharusnya melakukan pekerjaan karena tidak seluruh aparat desa dan lembaga kemasyarakatan dapat menjalankan pekerjaan dengan baik tanpa diberitahu terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Rajawali, 2001.
- Berry, David. 2003, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hamdi, 2000, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yursif Watampone.
- Kansil, CST dan Kansil, Christine ST. 2002, *Pemeerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kusnadi dkk, 2005, *Pengantar Manajemen*, Malang, Unibraw Malang.
- Koswara, E., *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta, Yayasan Feriba, 2001.
- Manullang, M. 2004, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rieneka Cipta.
- Pambudi, Himawan dkk. 2003, *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan otonomi Desa*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Umum.
- Rasyid, 2000, *Pemerintahan Yang Amanah*, Jakarta, Binarena Pariwara.
- Rosenbloom, David H, Dkk. *Public Administrasion*, Yogyakarta, Fokusmedia
- Sedarmayanti. 2004, *Good Governance*, Bandung, Mandar Ayu.
- Siswanto. 2005, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara Jakarta.
- Sobirun, Ronny (2005). *Modul Metode Penelitian*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Suropati.
- Soentoro, Ali Idris (2003). *Cara Mudah Belajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Depok: CV Taramedia.

- Syafi'e, Inu Kencana. 2003, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Mandar Madju.
- Terry, GR. 2000, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Alih Bahasa : J. Smith), Jakarta, Bumi Aksara.
- Tumpal, P Saragi. 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa : Alternatif Pemberdayaan Desa*, Jakarta, Cipruy.
- Widjaja, HAW. 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Yudhoyono, Bambang, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Harapan, 2001.

Dokumentasi

- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 5 tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Bengkalis.
- Keputusan Bupati Bengkalis No. 23 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Bengkalis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Fokusmedia.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Fokusmedia.